



LAPORAN KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

TAHUN 2020

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020.

Laporan ini disusun sebagai implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dengan disusunnya LKjIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Biro Kesejahteraan Rakyat dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial. Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi salah satu upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk

meningkatkan kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial kedepannya.

Surabaya, Februari 2021

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



Dr. HUDIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640323 198503 1 010



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Isu - Isu Strategis	5
D. Cascading Kinerja	8
E. Peta Proses Bisnis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra)	16
A.1. Tujuan dan Sasaran	16
A.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
A.3. Program Biro Kesejahteraan Rakyat	19
B. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat	23
A.1. Capaian Kinerja	
A.2. Capaian Kinerja dibandingkan tahun Sebelumnya	
A.3. Capaian Kinerja dibandingkan target pada Renstra	

A.4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja	
A.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
A.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja	
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN



A. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya sehingga menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas tersebut, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

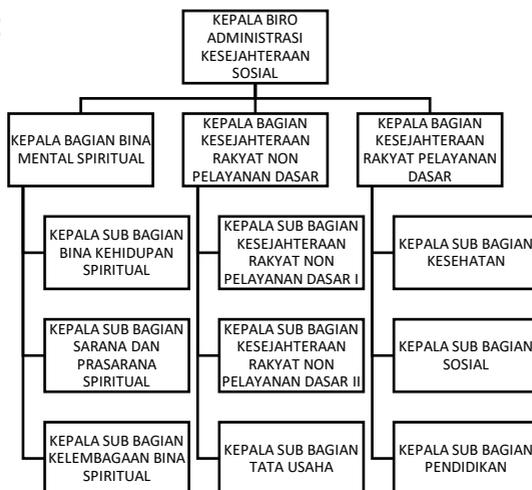
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahun 2020, Biro Kesejahteraan Rakyat masih mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur tersebut masih menggunakan nomenklatur lama, yaitu Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Sedangkan pada tahun 2021, nomenklatur dan struktur organisasi Biro menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :



B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang mental

kerohanian, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sedangkan fungsinya :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknik pelaksanaan di bidang Mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

di bidang Mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dan pengelolaan keuangan di bidang Mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

Jika berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020, mulai tahun 2021 Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Sedangkan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

C. ISU-ISU STRATEGIS

Untuk mewujudkan Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak, diperlukan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu perlu adanya pendayagunaan berbagai potensi Jawa Timur, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, berakhlak, dan beretika. Dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat akan berupaya maksimal untuk menghasilkan kebijakan dibidang Bina mental spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang mampu mendukung visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Jawa Timur dalam RPJMD 2019-2024.

Sedangkan pada tahun 2020, menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial tahun 2019 - 2024, maka isu strategis yang menjadi fokus dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pondok pesantren yang besar, yaitu 4.452 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 564.299 orang atau setara dengan 2,4% dari jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) Jawa Timur. Namun masih banyak pondok pesantren di Jawa Timur yang belum memberikan bekal yang utuh bagi santrinya. Kurangnya pendidikan formal di pondok pesantren dan pendidikan keterampilan vokasional yang diajarkan di pesantren, menyebabkan tamatan pondok pesantren memiliki ilmu yang terbatas pada ilmu agama saja.
2. Banyaknya huffadz yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren di Jawa Timur, tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang formal yang lebih tinggi, karena faktor ekonomi, perbedaan kurikulum dan kurangnya pengetahuan formal. Sedangkan jika langsung dilepas pada kehidupan bermasyarakat, maka pilihan pekerjaan terbatas untuk menjadi Guru Madrasah atau Guru Ngaji, karena kurangnya modal dan ketrampilan dari santri dan santriwati.

3. Masih banyak Masjid di wilayah Jawa Timur yang belum sejahtera khususnya di wilayah terpencil, daerah miskin, kampung nelayan, daerah rawan aqidah, pegunungan dan kepulauan. Padahal Masjid memiliki potensi besar sebagai lembaga umat dan bertemunya jamaah dari berbagai latar belakang. Saat ini data masjid yang termasuk dalam kriteria tersebut belum ada. Namun dari koordinasi awal dengan Dewan Masjid Indonesia di beberapa Kabupaten di Jawa Timur sebagai sampling diperoleh informasi bahwa masjid yang termasuk kriteria di wilayah terpencil, daerah miskin, kampung nelayan, daerah rawan aqidah, pegunungan dan kepulauan berkisar 1,5% - 2 % dari jumlah masjid yang ada. Oleh karena itu Imam dan Pengurus Masjid di daerah yang sesuai kriteria tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah sebagai upaya untuk mendukung kehidupan beragama yang lebih baik.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur Tahun 2020 sesuai data dari Badan Pusat Statistik adalah 71,71, menduduki peringkat ke-15 Nasional dengan kategori IPM Tinggi. Untuk terus

meningkatkan dibutuhkan upaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka percepatan pencapaian IPM di Jawa Timur, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perlu adanya koordinator yang mensinergikan beberapa Perangkat Daerah dengan tugas-tugas tersebut untuk bisa menuntaskan masalah IPM di Jawa Timur. Dengan demikian Gubernur Jawa Timur bisa mengambil kebijakan melalui rumusan yang tepat, tidak saling tumpang tindih dan mencakup beberapa permasalahan sekaligus terkait IPM di Jawa Timur.

5. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 pengeluaran per kapita masyarakat Jawa Timur yang disesuaikan mencapai Rp 11.600.000,- per tahun atau turun sebesar 1,18 % dari tahun 2019 sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal ini tentu berdampak pada kondisi social ekonomi masyarakat Jawa Timur, dimana terjadi kesenjangan terutama dikalangan pekerja yang bahkan harus dirumahkan sebagai kebijakan perusahaan karena adanya pandemi. Dengan pola hidup new normal yang membatasi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat menjadi

tantangan yang besar bagi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial untuk tetap membina mental spiritual masyarakat Jawa Timur.

Dengan berbagai permasalahan yang berkembang tersebut, maka strategi yang dilakukan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial antara lain :

- Meningkatkan keharmonisan sosial masyarakat Jawa Timur
- Meningkatkan potensi pondok pesantren di Jatim
- Meningkatkan kualitas tenaga pengajar lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Timur
- Berkomunikasi aktif dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan serta menyusun rumusan kebijakan tentang beribadah di era pandemi covid-19 dan era new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
- Bersinergi dengan Perangkat Daerah Mitra untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan pentingnya membangun ketahanan keluarga
- Bersinergi dengan Perangkat Daerah Mitra untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di

masyarakat karena adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur.

D. CASCADING KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai kekhasan kegiatan di bidang bina mental spiritual, karena program/kegiatan ini tidak diampu oleh Perangkat Daerah lain di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu Biro Kesejahteraan Rakyat juga ikut mendukung salah Indikator Keberhasilan Daerah yaitu Indeks Kepedulian Sosial.

Demikian juga dengan nomenklatur Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial di tahun 2020, juga mendukung hal sama, maka dapat digambarkan cascading kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dan Rentra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Visi Gubernur & Wakil Gubernur

Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong

Misi ke-3

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

Tujuan

Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Sasaran

Meningkatnya Kepedulian Sosial

Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial (Tahun 2020)

Tujuan

Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama

Sasaran

1. Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian
2. Revitalisasi nilai-nilai budaya melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan dibidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata
3. Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
5. Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial

Program : Pelayanan Kesekretariatan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	Program: Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian	Program: Administrasi Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Program: Layanan Administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program: Administrasi Bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Program: Layanan Dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial
Indikator: 1. Persentase indikator program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks profesionalisme ASN	Indikator: Persentase rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian yang ditindaklanjuti	Indikator: Persentase rumusan kebijakan dibidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang ditindaklanjuti	Indikator: Persentase kebijakan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti	Indikator: Persentase kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti	Indikator: Persentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti

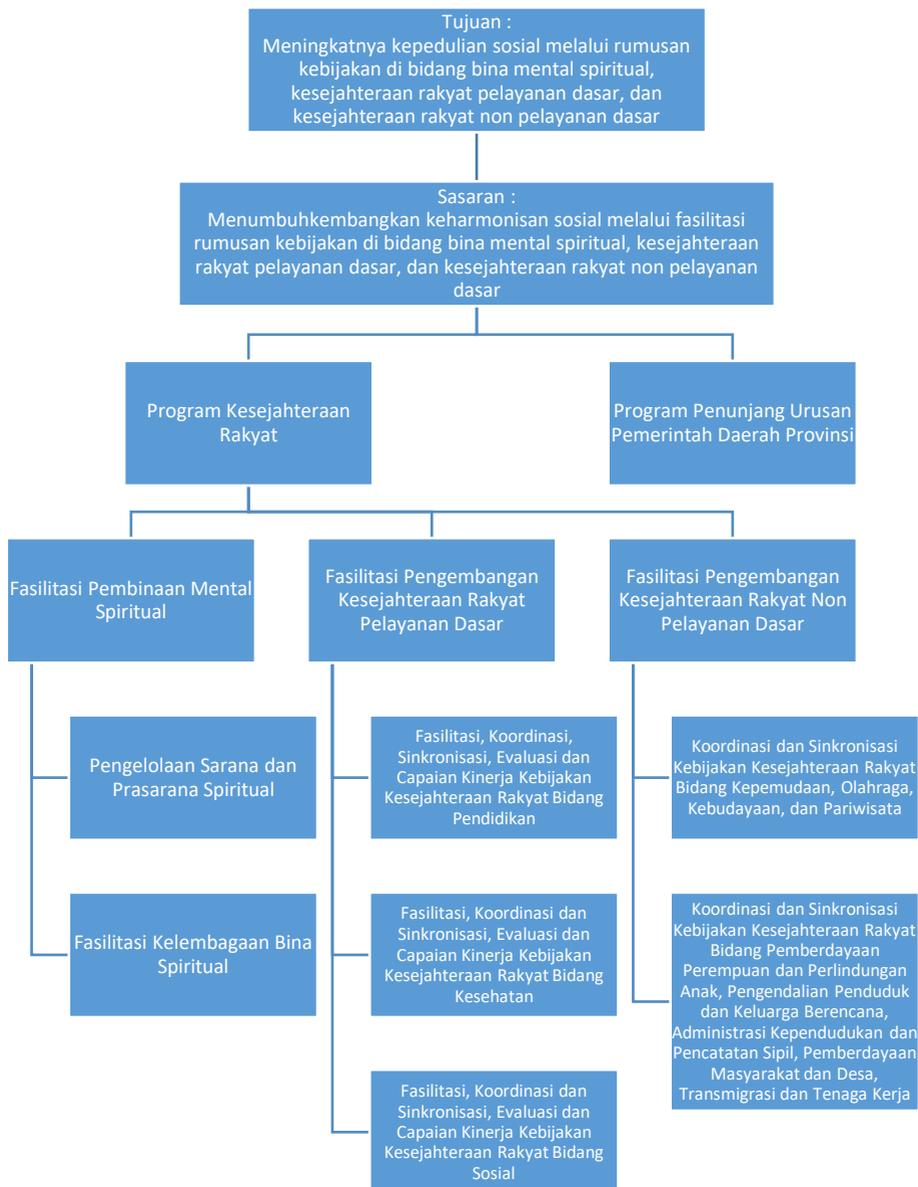
<p><u>Kegiatan:</u> Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Jumlah dokumen perencanaan 2. Jumlah dokumen pelaporan/ evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan</p>	<p><u>Kegiatan:</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang kerohanian</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, bahan pertimbangan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan keagamaan dan pembedaan kehidupan beragama 2. Indeks kepuasan peserta kegiatan hari besar terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan</p>	<p><u>Kegiatan:</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan 2. Indeks kepuasan masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan peringatan hari besar</p>	<p><u>Kegiatan:</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi 2. Indeks kepuasan masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional</p>	<p><u>Kegiatan:</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang penanganan sosial</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanganan sosial 2. Indeks kepuasan masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional</p>	<p><u>Kegiatan:</u> Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan</p> <p><u>Indikator:</u> Persentase dukungan layanan penyaluran hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan</p>
<p><u>Kegiatan:</u> Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data</p> <p><u>Indikator:</u> Jumlah update database yang menunjang pelayanan administrasi</p>	<p><u>Kegiatan:</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Kelembagaan</p> <p><u>Indikator:</u> Jumlah Rumusan Kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, bahan pertimbangan serta monitoring dan evaluasi di bidang kelembagaan agama</p>	<p><u>Kegiatan:</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga</p> <p><u>Indikator:</u> 3. Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang kepemudaan dan olahraga 4. Indeks kepuasan masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional</p>	<p><u>Kegiatan:</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Indeks kepuasan masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional</p>	<p><u>Kegiatan:</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanggulangan bencana 2. Indeks kepuasan masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional</p>	

<u>Kegiatan:</u> Pengelolaan administrasi keuangan <u>Indikator</u> Jumlah dokumen	<u>Kegiatan:</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan dibidang sarana dan prasarana <u>Indikator:</u> 1. Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, bahan pertimbangan serta monitoring dan evaluasi dibidang sarana peribadatan, sarana pendidikan keagamaan dan keagamaan	<u>Kegiatan:</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan dibidang kebudayaan dan pariwisata <u>Indikator:</u> 1. Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dibidang kebudayaan dan pariwisata 2. Indeks kepuasan masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan	<u>Kegiatan:</u> Pelaksanaan dan rumusan kebijakan dibidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana <u>Indikator:</u> 1. Jumlah rumusan kebijakan, koordinasi, petunjuk pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 2. Indeks kepuasan masyarakat/ peserta kegiatan terhadap pelaksanaan	
<u>Kegiatan:</u> Ketatausahaan dan Kepegawaian <u>Indikator</u> 1. Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian 2. Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor 4. Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	2. Jumlah guru madin yang mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik	Peringatan Hari Besar Nasional	Peringatan Hari Besar Nasional	

Pada tahun 2020 terdapat perkembangan kebijakan nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu juga adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terjadi perubahan nomenklatur, struktur, tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah. Permendagri ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 yang mengubah nomenklatur, struktur dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2021.

Cascading kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dapat tergambarkan sebagai berikut :



**Tabel Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator
Biro Kesejahteraan Rakyat**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kepedulian sosial melalui rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Tujuan : Indeks Kepedulian Sosial Sasaran : Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	<u>Program</u> : Kesejahteraan Rakyat	1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar 2. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
			<u>Kegiatan</u> : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pembinaan mental spiritual • Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina mental spiritual • Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti
			<u>Sub Kegiatan</u> : <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bahan perumusan kebijakan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan • Jumlah pelaporan evaluasi di bidang sarana dan prasarana spiritual

			<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase dukungan layanan administrasi dalam penyalurkan hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan • Jumlah bahan perumusan kebijakan di bidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama • Jumlah bahan perumusan kebijakan di bidang lembaga bina spiritual • Jumlah pelaporan evaluasi di bidang bina kehidupan spiritual • Jumlah pelaporan evaluasi di bidang kelembagaan bina spiritual • Indeks Kepuasan Peserta Kegiatan Keagamaan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan • Persentase dukungan layanan administrasi dalam penyalurkan hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan
			<p><u>Kegiatan :</u> Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar • Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
			<p><u>Sub Kegiatan :</u> Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan • Jumlah pelaporan evaluasi di bidang pendidikan

				<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang pendidikan
			<p><u>Sub Kegiatan :</u> Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan • Jumlah pelaporan evaluasi di bidang kesehatan
			<p>Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bahan perumusan kebijakan di bidang sosial • Jumlah pelaporan evaluasi di bidang sosial • Indeks Kepuasan Peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang sosial kemasyarakatan
			<p><u>Kegiatan :</u> Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar • Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
			<p><u>Sub Kegiatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bahan perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata • Jumlah pelaporan evaluasi di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata • Indeks Kepuasan Peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan

			<p>Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</p>	<p>Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaporan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja • Indeks Kepuasan Peserta kegiatan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			<p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro
			<p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<p>Persentase indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat yang tercapai</p>

		<p><u>Sub kegiatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pelaksanaan sistem informasi data • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD • Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah • Jumlah dokumen • Jumlah dokumen RKA Perubahan dokumen penyelenggaraan kearsipan • Jumlah dokumen DPA • Jumlah dokumen DPA Perubahan • Jumlah dokumen capaian kinerja • Jumlah dokumen evaluasi kinerja
		<p><u>Kegiatan:</u> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase realisasi anggaran biro Kesejahteraan Rakyat</p>
		<p><u>Sub Kegiatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN • Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD • Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan • Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN • Jumlah laporan verifikasi penatausahaan • Jumlah laporan data pegawai • Jumlah dokumen keuangan SKPD • Jumlah dokumen tanggapan atas LHP • Jumlah laporan keuangan • Jumlah laporan prognosis

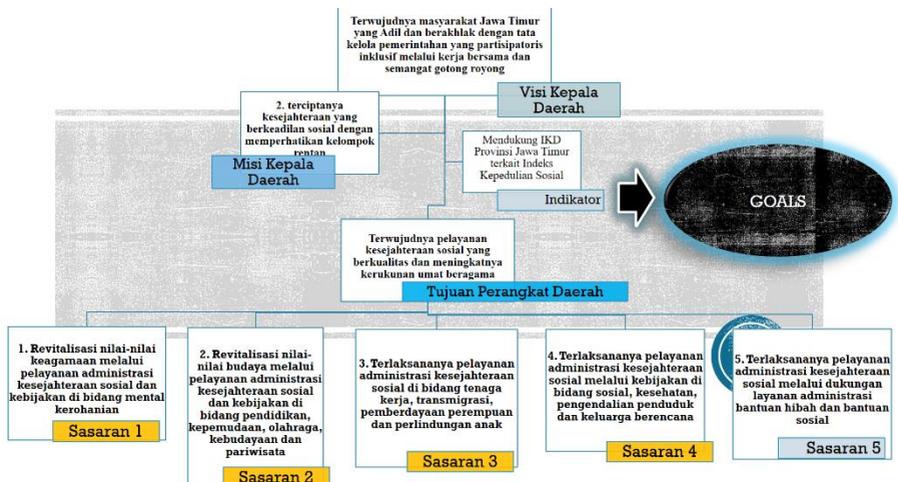
			<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 	
			<p><u>Kegiatan:</u> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	Jumlah dokumen kepegawaian
			<p><u>Sub Kegiatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai • Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian • Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian • Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai • Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan presensi pegawai • Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian • Jumlah laporan data pegawai • Jumlah laporan SKP • Jumlah kegiatan yang meningkatkan kompetensi Pegawai dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi
			<p><u>Kegiatan:</u> Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah paket pengadaan • Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital • Jumlah Sistem Informasi yang didukung
			<p><u>Sub kegiatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Fasilitas Kunjungan Tamu • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah paket pengadaan • Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital • Jumlah Sistem Informasi yang didukung

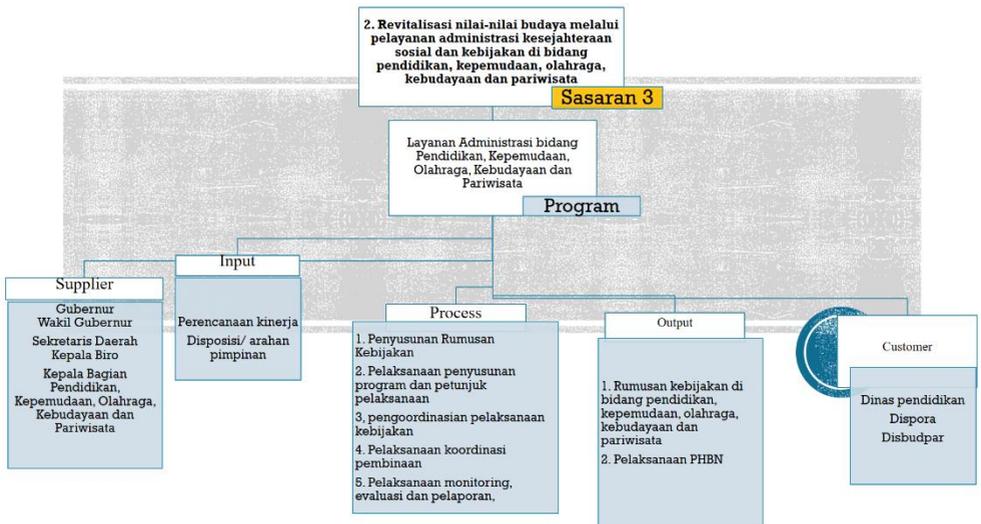
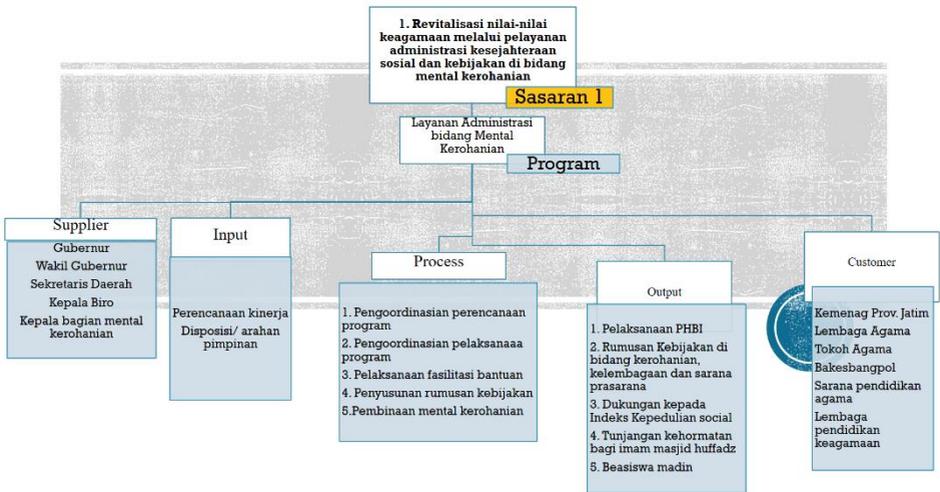
			<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 	
			<u>Kegiatan:</u> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			<u>Sub kegiatan:</u> <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mebel Jumlah peralatan dan mesin lainnya
			<u>Kegiatan:</u> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa yang menunjang pelayanan ketatausahaan
			<u>Sub kegiatan:</u> <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pengiriman dokumen Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa Jumlah jasa
			<u>Kegiatan:</u> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa untuk pemeliharaan aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			<u>Sub kegiatan:</u> <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah jasa Jumlah jasa

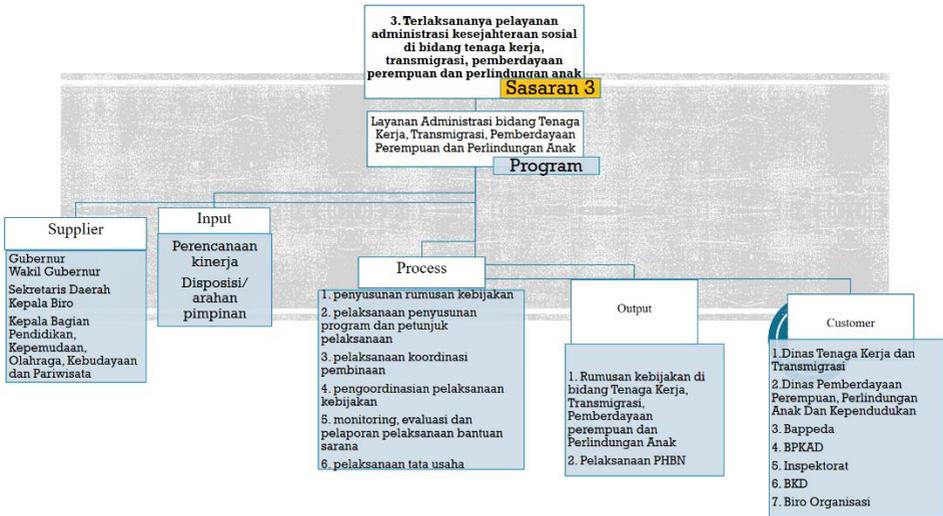
			<ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara• Jumlah gedung yang dipelihara
--	--	--	---	--

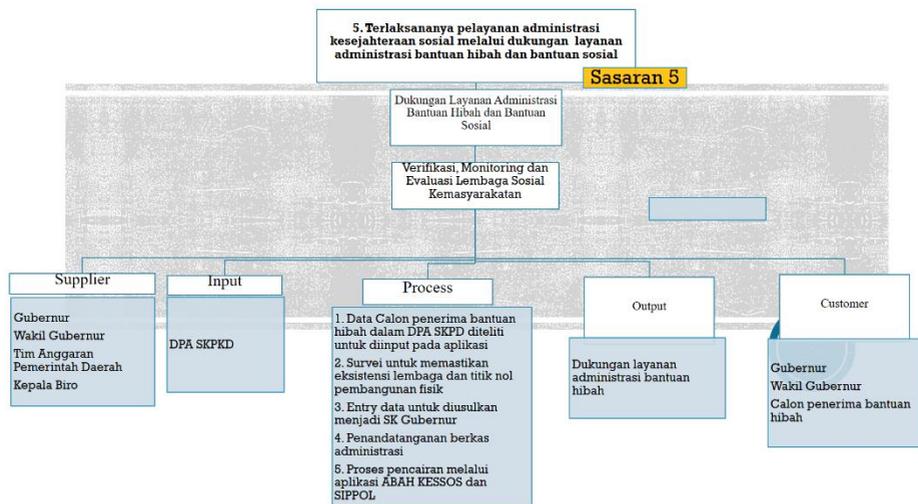
E. PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis yang mendasari kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2020 masih berdasar pada peta proses bisnis yang lama, dengan nomenklatur berdasar pada Pergub Nomor 44 Tahun 2019 dan hanya menitikberatkan pada strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Namun demikian peta proses bisnis ini masih memiliki banyak kekurangan, karena secara eksternal belum berdasarkan pada Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang seharusnya bisa menggambarkan dengan jelas posisi Biro dalam strategi pencapaian Sekretariat Daerah untuk menunjang visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur.









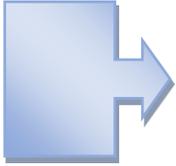
F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Dari hasil Evaluasi SAKIP tahun 2019 yang diselenggarakan oleh tim evaluator SAKIP, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan antara lain :

1. Biro Adm. Kesejahteraan Sosial telah menerapkan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja
2. Biro Adm. Kesejahteraan Sosial menyusun dokumen perencanaan dan telah menjabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja disemua

level. Hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran strategis dan hasil program

3. Mekanisme cascade kinerja sebaiknya berpedoman pada proses bisnis organisasi
4. Pelaksanaan reviu kinerja internal secara berkala belum optimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Meskipun Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur belum memiliki Rencana Strategis yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap Biro untuk menyusun Renstra masing-masing, sehingga Rencana Strategis yang dibuat oleh masing-masing Biro dalam Sekretariat Daerah bisa selaras dalam menunjang Visi dan Misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Dengan kondisi yang demikian terbatas, serta berdasar pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, Biro Kesejahteraan Rakyat menyusun Rencana Strategis Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial tahun 2019-2024 yang memuat tujuan organisasi yang ingin dicapai. Tujuan ini menjadi target yang ingin dicapai pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 terdapat perubahan nomenklatur, struktur dan fungsi yang tentu

juga merubah tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

A.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama.

b. Sasaran

1. Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian
2. Revitalisasi nilai-nilai budaya melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan dibidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata
3. Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang

sosial, kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

5. Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial pada dokumen Renstra 2019 - 2024 bisa ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel II.1
Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama	Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang mental kerohanian
	Revitalisasi nilai-nilai budaya melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan dibidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi,	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di abiding tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan

	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	perempuan dan perlindungan anak
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Persentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti

A.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2020 menyesuaikan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2024. IKU ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Adapun indikator utama Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial yang menjadi acuan, ditampilkan sebagai berikut :

Tabel – II.2
Indikator Kinerja Utama Biro Adm. Kesejahteraan Sosial

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang mental kerohanian	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti di Bidang Mental Kerohanian
Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan dibidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata serta revitalisasi nilai-nilai budaya	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	1. Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Persentase capaian kinerja pelayanan kesekretariatan	1. Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Menggunakan Key Performace Indicator dengan menghitung capaian pada semua indikator kegiatan
Terlaksananya pelayanan administrasi	Jumlah kebijakan yang dihasilkan	Jumlah kebijakan yang dihasilkan

kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	dan ditindaklanjuti di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Persentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	Jumlah proposal permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti sampai dengan penyaluran / jumlah proposal permohonan bantuan hibah x 100%

A.3 Program Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

Strategi pencapaian tujuan, sasaran serta indikator kinerja utama Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020 diimplementasikan melalui 6 program yang didukung 9 kegiatan meliputi :

❖ Program Prioritas :

1. Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian
2. Program Layanan Administrasi Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

3. Program Layanan Administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Program Layanan Administrasi Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Program Dukungan Layanan Administrasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

❖ **Program Penunjang :**

1. Program Pelayanan Kesekretariatan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan, Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan kinerja tertentu berdasarkan Sumber Daya Organisasi yang dimiliki.

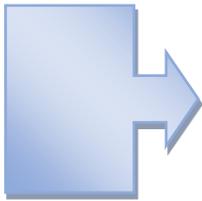
Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 sebagai Perangkat Daerah diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dengan Gubernur Jawa Timur, dilanjutkan dengan Perjanjian kinerja antara Pejabat Administrator (Para Kepala Bagian) dengan Kepala Biro serta antara Pejabat Pengawas (para Kepala Sub Bagian) dengan Pejabat Administrator dan seluruh Staf dengan Pejabat Pengawas di masing-masing Bagian.

Berikut diuraikan perjanjian kinerja Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 dalam rangka mencapai tujuan :

Tabel. II.3
Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang mental kerohanian	9
2.	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata serta revitalisasi nilai-nilai budaya	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	8

	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	8
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah kebijakan yang dihasilkan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	8
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Persentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	93 %



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A.1 CAPAIAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial tahun 2020, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Biro. Indikator yang digunakan merujuk pada tujuan Biro yang ingin dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian kinerja di Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pengukuran Kinerja yang ditetapkan atas dasar sasaran, indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase pencapaian sebagai berikut :

**Tabel III. 1.
Pencapaian Kinerja Biro Adm. Kesejahteraan Sosial**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN %
1.	Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang mental kerohanian	10	8	80
2.	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata serta revitalisasi nilai-nilai budaya	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	9	7	77,7
3.	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	10	8	80
4.	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian	Jumlah kebijakan yang dihasilkan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan	9	7	77,7

	penduduk dan keluarga berencana	keluarga berencana			
5.	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Jumlah permohonan bantuan hibah yang akan dilayani secara administratif	5000	5076	101,5 %

A.2 CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA

Dikarenakan perubahan tujuan, sasaran dan indikator capaian kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka perbandingan capaian kinerja akan digambarkan melalui capaian kinerja dari masing-masing program yang indikatornya masih sama.

Tabel III.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
1.	Layanan Administrasi di bidang Mental Kerohanian	Persentase rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian yang ditindaklanjuti	92,6 %	94,1 %

2.	Layanan Administrasi di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	Persentase rumusan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang ditindaklanjuti	87,7 %	91,4 %
3.	Layanan Administrasi di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase rumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti	97,2 %	94,1 %
4.	Layanan Administrasi di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase rumusan kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti	86,06 %	91,4 %
5.	Dukungan Layanan Administrasi Bantuan Hibah	Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	101,1 %	100,61 %

Fluktuasi capaian yang terdapat pada kolom diatas dikarenakan adanya perubahan target pada program, meskipun indikatornya sama, sehingga menghasilkan prosentase capaian seperti diatas.

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DAN TARGET PADA RENSTRA 2019 - 2024

Dengan adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 untuk penanganan pandemi covid-19, maka Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial menurunkan target capaian kinerja dari yang sebelumnya terdapat pada dokumen perencanaan strategis. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan fasilitasi sehingga berpengaruh pada outcome yang dihasilkan Biro. Meskipun sebagian besar kegiatan dapat terselenggara secara daring, namun dengan keterbatasan sarana, kualitas dan kapasitas SDM, maka dilakukan juga rasionalisasi target kinerja.

Kemudian dengan adanya kebijakan nasional untuk perubahan nomenklatur dan struktur organisasi menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2021, maka disusunlah Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 yang memuat berbagai perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan masing-masing indikatornya. Dengan demikian target kinerja tahun 2021 hingga 2024 menyesuaikan dengan dokumen perubahan Renstra dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Realisasi kinerja tahun 2020 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Indikator, Target dan Realisasi Kinerja pada Renstra 2019 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target renstra tahun ke-		Realisasi capaian tahun ke-	
		2019	2020	2019	2020
1.	Persentase Kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti	100 %	-	92,6 %	-
2.	Persentase Kebijakan di Bidang Pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang ditindaklanjuti	100 %	-	87,7 %	-
3	Persentase kebijakan di Bidang Tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti	100 %	-	97,2 %	-
4	Persentase kebijakan di Bidang Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti	100 %	-	86,6 %	-
5	Persentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	100 %	93 %	96,4 %	97,6 %
6.	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang mental kerohanian	-	10	-	8
7.	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	-	11	-	7
8.	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	18	-	8

6.	Jumlah kebijakan yang dihasilkan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	-	13	-	7
----	--	---	----	---	---

Tabel III.4
Indikator, Target dan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra
2019 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target renstra tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024
1.	<u>Sasaran :</u> Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	85 %	87 %	90 %	92 %
2.	<u>Program :</u> 1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	85 %	87 %	90 %	92 %
	2. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	27	30	33	36

A.4 ANALISIS PENYEBAB KENAIKAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan capaian kinerja pada tahun 2019 dan 2020 diperlukan pendekatan yang berbeda, karena terdapat perubahan

indikator sasaran menyesuaikan pada dokumen Renstra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 – 2024.

Dalam Tabel III.2 dapat dilihat capaian kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial jika dibandingkan dengan tahun lalu, menggunakan pendekatan indikator program yang masih sama meskipun targetnya berbeda. Dengan pendekatan tersebut dapat dilihat kenaikan capaian kinerja di hampir semua program yang ada di Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dan 2020 dapat digambarkan pada diagram berikut :



Capaian kinerja tersebut terkait dengan perubahan indikator dan target di tahun 2020 yang menyesuaikan dengan dokumen Renstra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 – 2024. Selain itu dengan adanya refocusing anggaran, maka perlu merasionalkan target dengan terbatasnya sumber daya anggaran, dan kapasitas SDM.

Kenaikan capaian kinerja di tahun 2020 meskipun ditengah pandemi covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa dianalisa sebagai berikut :

Strenght	Weakness	Opportunities	Threat
<p>a. Jumlah SDM yang cukup banyak</p> <p>b. Peran biro yang strategis sebagai fasilitator dan coordinator Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan terkait</p> <p>c. Adanya kesempatan untuk merasionalkan target setelah refocusing anggaran</p>	<p>a. Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan kurang maksimal hingga Bulan Mei</p> <p>b. Jadwal survei lembaga calon penerima bantuan hibah yang diundur karena pandemi membuat kegiatan menumpuk diakhir tahun</p> <p>c. Anggaran terbatas setelah refocusing</p>	<p>a. Banyaknya Perangkat daerah yang menjadi mitra bisa memberikan masukan data dan bekerjasama dalam perumusan kebijakan</p>	<p>a. Belum adanya dokumen perencanaan di Sekretariat Daerah yang seharusnya menjadi dasar bagi masing-masing Biro untuk menyusun dokumen perencanaan</p>

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dengan memasang faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Strength – Opportunity

Fokus pada kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.

- a. Bekerjasama dengan Perangkat Daerah mitra dengan mengoptimalkan jumlah SDM yang banyak secara bergantian. Meskipun dilakukan secara daring, namun masing-masing staf memiliki pengalaman untuk berkoordinasi dan “sharing knowledge” dengan PD mitra.
- b. Setiap staf terlibat aktif dalam rapat koordinasi perumusan kebijakan dengan fokus pada tugasnya pada jabatan fungsional umum pengolah data atau analis.
- c. Berkoordinasi dengan Bappeda terkait rasionalisasi target capaian kinerja serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra untuk mempertimbangkan sub kegiatan yang masih dapat terlaksana dengan adanya pandemi

dan refocusing anggaran, serta berdasar pada arahan Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. Weakness – Opportunity

Menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal

- a. Melalui pertemuan daring dan pertemuan luring dengan protokol kesehatan yang ketat, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial berupaya untuk tetap menghasilkan kinerja melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra.
- b. Fokus untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra selama masa awal pandemi dalam perumusan kebijakan, sebelum adanya arahan Gubernur untuk survei lembaga calon penerima bantuan hibah
- c. Memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan kinerja.

3. Strength – Threats

Menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal

- a. Meskipun adanya WFH (Work From Home) di tahun 2020, masing-masing staf tetap melaksanakan kinerja yang telah direncanakan

dan diterjemahkan kedalam perjanjian kinerja. WFH yang dijalankan harus tetap efektif dan menghasilkan kinerja. Untuk itu setiap individu diharapkan professional dalam pekerjaannya, mengerti target kinerjanya setiap bulan dan berupaya untuk memenuhi target tersebut.

Dengan perencanaan kinerja yang baik, staf mempunyai kemampuan untuk menghitung Waktu Kerja Efektif yang dimiliki, sehingga dapat memperhitungkan waktu yang tersisa dan target yang belum terselesaikan, termasuk dengan memperhitungkan beban tugas tambahan. Dengan demikian jumlah SDM yang besar bisa memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran Biro.

- b. Perlu adanya upaya untuk menyusun dokumen perencanaan ditingkat Sekretariat Daerah, dengan memperhatikan tugas dan fungsi keberadaan Sekretariat Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

4. Weakness – Threats

Memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal

- a. Dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada semua sektor pemerintahan, memberikan kesempatan kepada Biro sebagai unsur fasilitator dan koordinator untuk menggandeng Perangkat Daerah yang menjadi mitra agar dapat bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan karena covid-19. Upaya penyelesaian permasalahan yang kompleks dan lintas sektor menjadi tanggung jawab Biro agar dapat terus eksis dimasa pandemi.
- b. Adanya WFH dan tugas tambahan yang besar terkait Peringatan Hari Besar Nasional dan dukungan layanan administrasi bantuan hibah tidak menjadi alasan untuk tidak hadir pada rapat terkait tupoksi. Dengan adanya pemanfaatan IT melalui zoom meeting, Whatsapp group, live Instagram dan live youtube menjadi sarana untuk bisa tetap eksis dan berkinerja dalam perumusan kebijakan.

A.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Biro Kesejahteraan Sosial dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana serta anggaran di Biro. Terkait sumber daya anggaran, Dokumen penganggaran di tahun 2020 berubah tiga kali dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.

Untuk mengetahui persentase anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada masing-masing sasaran strategis jika dibandingkan dengan keseluruhan anggaran pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.5
Alokasi per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1.	Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan dibidang mental kerohanian	32.419.813.830	48,7
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang pendidikan,	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang pendidikan, kepemudaan,	5.708.814.360	8,57

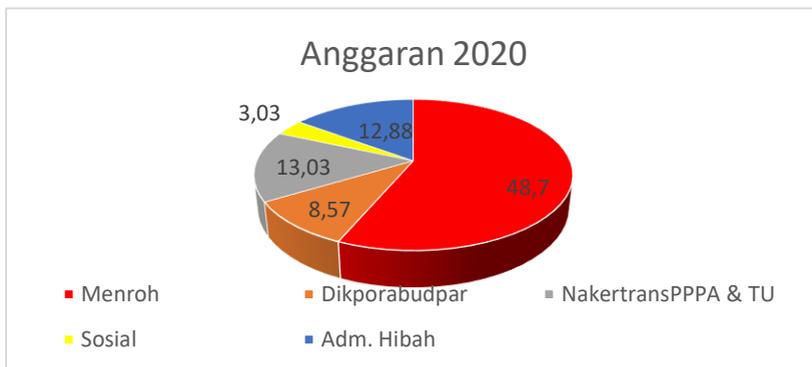
	kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata serta revitalisasi nilai-nilai budaya	olahraga, kebudayaan dan pariwisata		
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	8.673.333.332	13,03
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah kebijakan yang dihasilkan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.017.550.208	3,03
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Persentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	8.573.249.081	12,88

Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat bahwa faktor dukungan anggaran pada masing-masing bagian sangat bervariasi, dengan sebagian besar terdapat pada sasaran Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian. Hal tersebut

dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah lain di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan bina mental kerohanian selain Biro Adminisitrasi Kesejahteraan Sosial.

Sehingga fokus anggaran yang terbatas dioptimalkan di sasaran tersebut agar selama masa pandemi, Pemerintah melalui Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dapat hadir untuk memberikan ketenangan spiritual di masyarakat melalui berbagai kebijakan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan.

Faktor dukungan anggaran pada masing-masing sasaran yang diampu oleh setiap bagian dapat digambarkan dari diagram berikut :



Pemanfaatan sumber daya anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi anggaran yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel III.6

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Biro Adm. Kesejahteraan Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian	Revitalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang mental kerohanian	9	8	88,8	32.419.813.830	31.709.208.281	97,81
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata serta revitalisasi nilai-nilai budaya	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial dan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata serta revitalisasi nilai-nilai budaya	8	7	87,5	5.708.814.360	5.547.919.233	97,18
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan	8	8	100	8.673.333.332	8.039.217.065	92,69

	anak serta pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	perlindungan anak serta pelayanan kesekretariatan perangkat daerah							
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	8	7	87,5	2.017.550.208	1.889.913.670	93,67	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan sosial melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial	93 %	97,6 %	104,9 %	8.573.249.081	8.117.245.754	94,68	

A.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

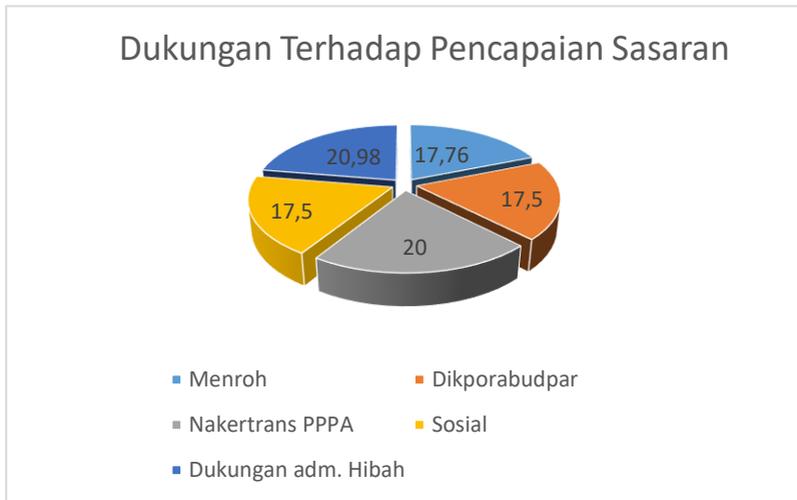
Capaian kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial selama tahun 2020 sebagaimana tergambar dalam Tabel III.1 berhasil diraih karena adanya kinerja dari masing-masing bagian untuk menghasilkan rekomendasi dan rumusan kebijakan sebagai hasil dari koordinasi dengan PD mitra yang terkait dengan tupoksi Biro Adm.

Kesejahteraan Sosial. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan Biro : Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama		
Indikator sasaran	Capaian	Mendukung Sasaran
Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan dibidang mental kerohanian	88,8 %	17,76 %
Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	87,5 %	17,5 %
Jumlah Rumusan kebijakan yang dihasilkan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100 %	20 %
Jumlah kebijakan yang dihasilkan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	87,5 %	17,5 %
Persentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	104,9 %	20,98 %
Capaian Sasaran Tahun 2020		93,74 %

Pencapaian sasaran secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 91,92 %

Dari tabel tersebut, dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut :



Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing bagian berkontribusi pada pencapaian sasaran Biro dengan jumlah yang hampir sama besar. Meskipun terdapat perbedaan capaian pada masing-masing bagian, namun semuanya telah bersinergi dan bekerjasama untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kesejahteraan sosial.

Dari berbagai tabel dan analisa yang telah disampaikan mengenai capaian kinerja tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Administrasi

Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah bisa dipertanggungjawabkan, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seperti :

1. Adanya pandemi covid-19 membawa dampak bagi pegawai untuk mengubah cara kerja dan kebiasaan dengan menerapkan new normal dan protokol kesehatan yang ketat di kantor. Adanya WFH membuat setiap pegawai secara profesional harus bisa menghitung secara mandiri target dan waktu pencapaian kinerja, serta menyimpan bukti kerja masing-masing. Pandemi juga membawa perubahan dalam penganggaran dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19. Dengan adanya refocusing, maka Biro melaksanakan rasionalisasi target kinerja dengan terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana.
2. Tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan seperti dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan Peringatan Hari Besar Nasional belum dapat diakomodir pada Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2019.
3. Belum adanya dokumen perencanaan dilevel Sekretariat Daerah yang menjadi acuan untuk

menyusun dokumen perencanaan dilevel Biro, sehingga selaras antara tujuan dan sasarannya dalam rangka mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.

4. Kurangnya koordinasi antar instansi di Kabupaten/Kota, sehingga seringkali berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang kurang maksimal di daerah.
5. Hasil rapat koordinasi belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara langsung, mengingat ada pembagian kewenangan dan urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Namun beberapa kondisi tersebut tidak membuat kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial memburuk, namun sebagai pendorong untuk lebih baik lagi dalam mencapai target kinerja kedepannya. Jika melihat bahwa hampir semua indikator di Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi tidak menghambat Biro untuk terus berkinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan anggaran pada tahun 2020 untuk setiap program telah dilakukan sebaik mungkin oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, dengan penyerapan anggaran mencapai **95,74 %**. Realisasi anggaran Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.7
Realisasi Anggaran Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

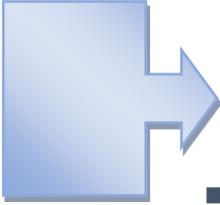
No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	9.166.103.300,00	8.422.451.645,00	91,89
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah</i>	57.025.000,00	29.673.500,00	52,04
	<i>Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	1.976.371.900,00	1.923.434.550,00	97,32
	<i>Ketatausahaan dan Kepegawaian</i>	7.084.706.400,00	6.421.796.095,00	90,64
	<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	48.000.000,00	47.547.500,00	99,06
2	Program Layanan Administrasi Bidang Mental dan Kerohanian	32.419.813.830,00	31.709.208.281,00	97,81
	<i>Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang kerohanian</i>	9.799.638.600,00	9.302.740.142,00	94,93
	<i>Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang kelembagaan</i>	22.067.575.230,00	21.855.142.019,00	99,04
	<i>Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana</i>	552.600.000,00	551.326.120,00	99,77
3	Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan,	5.708.814.360,00	5.547.919.233,00	97,18

	Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata			
	<i>Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Pendidikan</i>	2.078.867.460,00	2.020.041.442,00	97,17
	<i>Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga</i>	2.489.811.800,00	2.428.969.625,00	97,56
	<i>Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata</i>	1.140.135.100,00	1.098.908.166,00	96,38
4	Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.673.333.332,00	8.039.217.065,00	92,69
	<i>Pelaksanaan dan Rumusan Kebijakan dibidang Tenaga Kerja Transmigrasi</i>	3.011.084.732,00	2.885.100.865,00	95,82
	<i>Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>	5.662.248.600,00	5.154.116.200,00	91,03
8	Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.017.550.208,00	1.889.913.670,00	93,67
	<i>Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang penanganan sosial</i>	1.187.453.000,00	1.099.957.820,00	92,63
	<i>Pelaksanaan dan Rumusan Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana</i>	383.057.208,00	365.791.000,00	95,49
	<i>Pelaksanaan dan Rumusan Kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana</i>	447.040.000,00	424.164.850,00	94,88
9	Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan social	8.573.249.081,00	8.117.245.754,00	94,68
	<i>Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Masyarakat</i>	8.573.249.081,00	8.117.245.754,00	94,68

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Biro Kesejahteraan Rakyat, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP, antara lain :

1. Menerapkan budaya kerja Gus Kesra untuk menyusun indikator kinerja yang sesuai dan menghitung waktu kerja efektif yang rasional, serta capaian kinerja masing-masing staf.
2. Bekerjasama dengan perangkat daerah mitra untuk mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan agar bisa menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat integratif.
3. Pemanfaatan evaluasi kinerja triwulan untuk menghitung capaian kinerja staf menyesuaikan dengan target bulanan dan tahunan
4. Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mensupport kinerja pegawai



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM Aparatur, dan pelaksanaan kebijakan merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2019 yang telah ditampilkan pada BAB III, maka dapat dilihat capaian kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,98% jika dibandingkan kinerja tahun 2019 menjadi sebesar 93,74% dengan hampir

semua indikator mengalami peningkatan, meskipun ditengah pandemi covid-19.

B. SARAN

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk terus meningkatkan kinerja adalah :

- a) Pengembangan kebijakan nasional terkait kodefikasi dan nomenklatur, menjadi salah satu kesempatan untuk penataan kelembagaan dengan tugas dan fungsi yang lebih jelas, tidak tumpang tindih dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra dan juga bisa mengakomodir semua tugas-tugas yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat.
- b) Penyempurnaan mekanisme dan meningkatkan pelayanan administrasi baik tingkat kualitas maupun kuantitas dengan menyusun Standar Operasional Prosedur yang jelas, sesuai dengan proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut perlu dilakukan dengan melihat pada proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengenali posisi Biro

dan hubungannya dengan Perangkat Daerah lain, dimana Biro merupakan unsur staf di Sekretariat Daerah yang menunjang kinerja Sekretaris Daerah dan menjadi second opinion Gubernur dan berbeda dengan Dinas yang merupakan front liner unsur Pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak pelaksanaan rumusan kebijakan.

- c) Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif, agar dapat mengoptimalkan kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
- d) Sangat diperlukan saran dari stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial ;
- e) Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis.

Demikian Laporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020 dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran Biro yang akuntabel. Semoga Laporan ini bisa menjadi salah satu upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat kedepannya.

Surabaya, Februari 2021
Kepala Biro Kesejahteraan
Rakyat



Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010

LAMPIRAN